



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

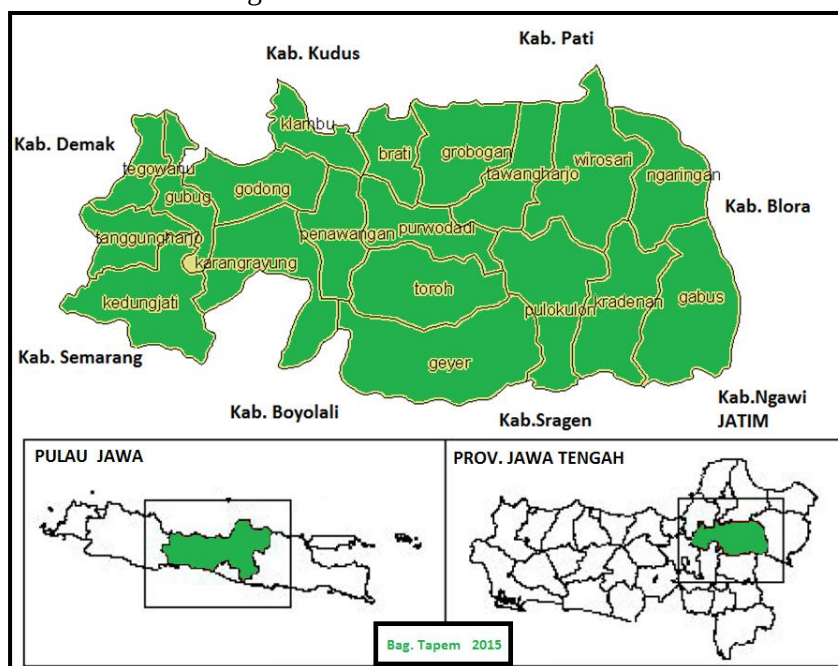
2.1. Ekonomi Makro Daerah

A. Kondisi Geografis

1. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar I. 1.

Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

2. Luas Wilayah

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Sedangkan



secara administrasi Kabupaten Grobogan terbagi/terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana tampak dalam Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggungharjo	9	31	60,628
Jumlah		280	1.451	1.975,86

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab.Grobogan

3. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari tanah sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian dengan perincian sebagaimana Tabel I.2 berikut:



Tabel I.2
Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2014

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Tegal/Kebun	Lainnya		
1	Kedungjati	224,000	555,051	1.849,949	10.023,000	382,000	13.034,000
2	Karangrayung	1.618,757	2.599,072	1.467,171	5.907,000	2.467,000	14.059,000
3	Penawangan	4.217,000	599,784	247,216	1.434,000	920,000	7.418,000
4	Toroh	2.613,070	2.849,629	734,301	3.411,000	2.323,000	11.931,000
5	Geyer	41,000	3.301,036	1.406,964	14.036,000	834,000	19.619,000
6	Pulokulon	-	6.917,328	150,672	3.603,000	2.694,000	13.365,000
7	Kradenan	596,000	4.751,460	11,460	2.871,000	2.567,000	10.774,000
8	Gabus	-	5.725,207	194,793	8.392,000	2.225,000	16.537,000
9	Ngaringan	1.693,000	4.374,438	770,562	2.199,000	2.635,000	11.672,000
10	Wirosari	506,000	5.365,746	1.630,254	5.883,000	2.045,000	15.430,000
11	Tawangharjo	-	3.590,763	865,237	3.028,000	876,000	8.360,000
12	Grobogan	120,000	3.650,785	559,215	4.102,000	2.024,000	10.456,000
13	Purwodadi	3.185,000	1.758,451	281,549	12,000	2.528,000	7.765,000
14	Brati	1.034,830	1.500,321	589,849	1.186,000	1.179,000	5.490,000
15	Klambu	2.415,642	-	311,358	1.153,000	776,000	4.656,000
16	Godong	5170,000	1.552,379	257,621	181,000	1.518,000	8.679,000
17	Gubug	4059,130	-	-	1.132,870	1.919,000	7.111,000
18	Tegowanu	3214,000	879,599	290,401	-	783,000	5.167,000
19	Tanggunharjo	709,000	1.369,154	98,846	2.853,000	1.033,000	6.063,000
	JUMLAH	31.416,429	51.340,203	11.694,498	71.406,870	31.728,000	197.586,000

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan.

4. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan dibagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0 – 8⁰. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi,



Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.

2. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8-15⁰ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
3. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15⁰, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

B. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2014 tercatat sebesar 1.412.325 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,68% atau bertambah 9.565 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2013. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:

Tabel I. 3
Jumlah Penduduk Tahun 2014

NO.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERTUMBUHAN
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN		
1	2013	705.352	697.408	1.402.760	-
2	2014	713.077	699.248	1.412.325	0,68 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Tahun 2014

Jika dilihat dari segi sex ratio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.077 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 699.248 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 102%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki.



2. Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Sex Rasio

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 131.590 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.195 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut:

Tabel I.4

Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2014

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
1	KEDUNGJATI	22.411	22.080	44.491	101,50
2	KARANGRAYUNG	47.764	46.873	94.637	101,90
3	PENAWANGAN	31.918	31.597	63.515	101,02
4	TOROH	57.406	57.120	114.526	100,50
5	GEYER	33.394	33.000	66.394	101,19
6	PULOKULON	53.270	51.080	104.350	104,29
7	KRADENAN	40.879	39.846	80.725	102,59
8	GABUS	36.653	35.675	72.328	102,74
9	NGARINGAN	34.390	33.061	67.451	104,02
10	WIROSARI	45.089	44.258	89.347	101,88
11	TAWANGHARJO	28.660	27.579	56.239	103,92
12	GROBOGAN	38.096	36.751	74.847	103,66
13	PURWODADI	65.869	65.721	131.590	100,23
14	BRATI	24.811	24.042	48.853	103,20
15	KLAMBU	19.497	18.698	38.195	104,27
16	GODONG	42.741	42.679	85.420	100,15
17	GUBUG	41.697	41.118	82.815	101,41
18	TEGOWANU	27.531	27.031	54.562	101,85
19	TANGGUNGHARJO	21.001	21.039	42.040	99,82
	JUMLAH	713.077	699.248	1.412.325	101,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Tahun 2014.



3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dari aspek kepadatan penduduk tercatat sebesar 714 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.694 jiwa/km² dan kecamatan kepadatan terendah di kecamatan Geyer yaitu sebesar 338 jiwa/km².

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat dalam Tabel I.5 dibawah ini:

Tabel I.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2014

NO	KECAMATAN	LUAS WIL KM2	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN JIWA/KM2
1	Kedungjati	130,342	44.491	341,34
2	Karangrayung	140,595	94.637	673,12
3	Penawangan	74,177	63.515	856,26
4	Toroh	119,320	114.526	959,82
5	Geyer	196,192	66.394	338,41
6	Pulokulon	133,644	104.350	780,81
7	Kradenan	107,748	80.725	749,20
8	Gabus	165,365	72.328	437,38
9	Ngaringan	116,720	67.451	577,89
10	Wirosari	154,298	89.347	579,05
11	Tawangharjo	83,602	56.239	672,70
12	Grobogan	104,556	74.847	715,86
13	Purwodadi	77,656	131.590	1.694,52
14	Brati	54,891	48.853	890,00
15	Klambu	46,562	38.195	820,30
16	Godong	86,780	85.420	984,33
17	Gubug	71,119	82.815	1.164,46
18	Tegowanu	51,670	54.562	1.055,97
19	Tanggunharjo	60,628	42.040	693,41
	JUMLAH	1.975,865	1.412.325	714,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Tahun 2014.

4. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut bukan angkatan



kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

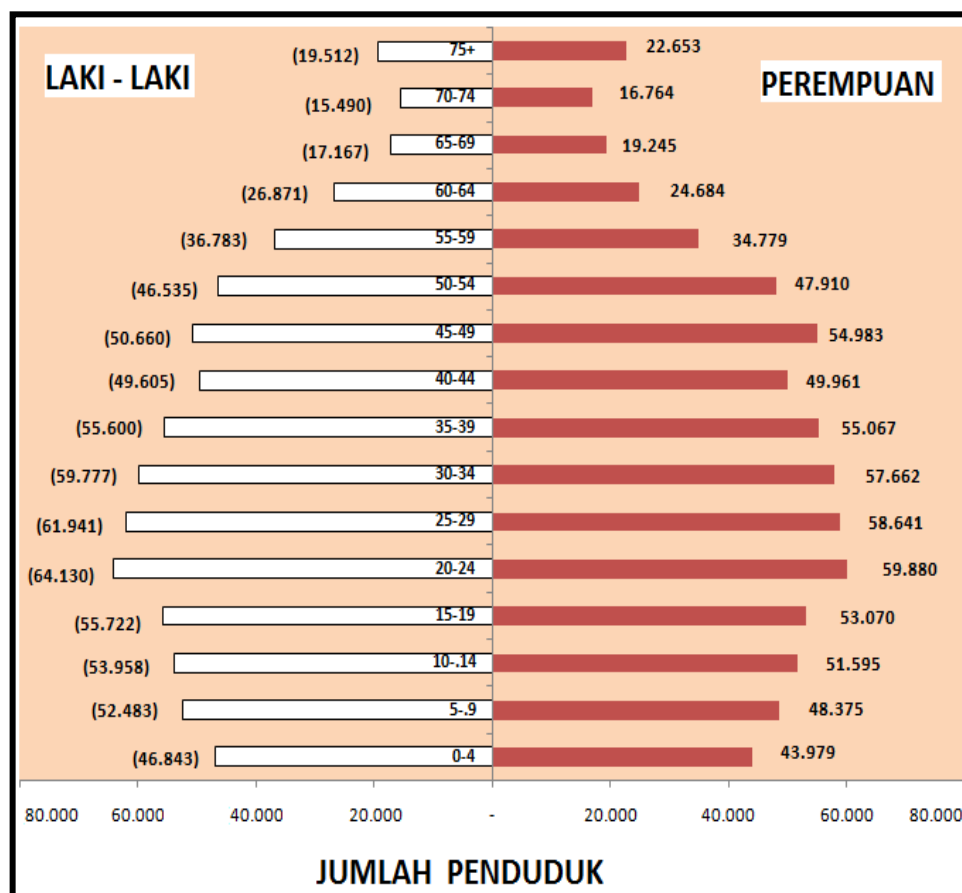
Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I. 6
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2014

No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	0-4	46.843	43.979	90.822
2	5-9	52.483	48.375	100.858
3	10-14	53.958	51.595	105.553
4	15-19	55.722	53.070	108.792
5	20-24	64.130	59.880	124.010
6	25-29	61.941	58.641	120.582
7	30-34	59.777	57.662	117.439
8	35-39	55.600	55.067	110.667
9	40-44	49.605	49.961	99.566
10	45-49	50.660	54.983	105.643
11	50-54	46.535	47.910	94.445
12	55-59	36.783	34.779	71.562
13	60-64	26.871	24.684	51.555
14	65-69	17.167	19.245	36.412
15	70-74	15.490	16.764	32.254
16	75 +	19.512	22.653	42.165
	TOTAL	713.077	699.248	1.412.325

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan
Tahun 2014.

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.2 sebagai berikut :



Gambar. I.2

Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2014

Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-65 tahun), yang mencapai 1.004.261 jiwa, kemudian kelompok usia bukan produktif (usia 0-15 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 408.064 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang belum/tidak produktif.

5. Ketenagakerjaan

Angka pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2010 sampai tahun 2014, mengalami tren penurunan sebagaimana data dalam tabel I.7 sebagai berikut:



Tabel I.7
Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKT KERJA	JUMLAH PENYERAPAN	YG BELUM TERSERAP	PREDIKSI PENGANGGURAN
1	2010	769.624	734.231	35.393	4,60
2	2011	731.572	693.556	38.016	5,20
3	2012	778.813	745.068	33.745	4,33
4	2013	755.761	710.014	45.747	6,05

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan.

6. Pendidikan

Kondisi pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2014, sebagaimana berikut:

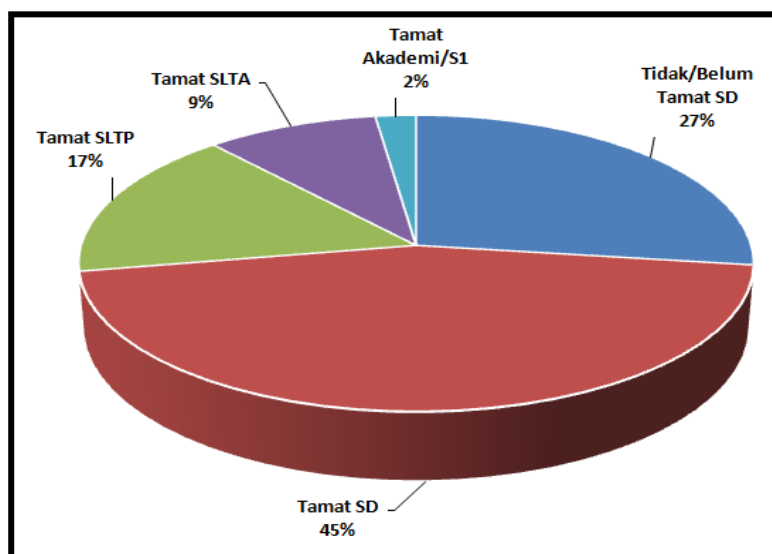
Tabel I.8
Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2014

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2014
1	Tidak/Belum Tamat SD	382.886
2	Tamat SD	636.979
3	Tamat SLTP	230.448
4	Tamat SLTA	131.209
5	Tamat Akademi / S1/ setelah SLTA	30.803
	TOTAL	1.412.325

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Tahun 2014.

Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 45%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 27%, SLTP atau sederajat 17%, tamatan SMU atau sederajat 9 %, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%.

Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar I.3 berikut:



Gambar I.3
Komposisi Tingkat Pendidikan penduduk

Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.9 berikut:

Tabel I.9
APM dan APK Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	APK SD	106,34	102,56	103,08	115,41	112,06
2.	APM SD	94,8	89,35	95,09	95,15	96,56
3.	APK SLTP	83,16	97,60	98,55	99,46	107,09
4.	APM SLTP	69,27	86,87	90,59	80,74	84,05
5.	APK SLTA	54,16	28,92	47,32	56,70	63,79
6.	APM SLTA	35,18	26,68	33,87	33,93	41,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara)

Usia sekolah SD: 7-12 tahun, SLTP: 13-15 tahun, SLTA: 16-18 tahun.

Dari tabel I.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2014, nilai APM SD sebesar 96,56. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 96,56 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kondisi ini menunjukkan perbaikan.
- 2) Nilai APM SLTP sebesar 84,05, artinya sebanyak 84,05 persen anak usia SLTP tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.



- 3) Nilai APM SLTA sebesar 41,02 artinya sebanyak 41,02 persen anak 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SLTA.

Selanjutnya kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel I.10 sebagai berikut:

Tabel I.10
Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2010-2014

NO	TAHUN	SD			SLTP			SLTA		
		RB	RR	B	RB	RR	B	RB	RR	B
1.	2010	1.449	1.623	2.132	123	242	1.659	590	37	10
2.	2011	1.519	371	2.375	77	70	1.566	4	55	519
3.	2012	1.765	1.354	1.711	47	110	366	21	76	640
4.	2013	1466	1276	2546	109	261	1557	20	132	712
5.	2014	683	2931	1269	200	958	446	41	150	740

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2014

RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B: Bagus

7. Kesejahteraan Sosial

a) Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten Grobogan berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,86% pada tahun 2010 dan berurutan mengalami penurunan 17,38%, 16,13% dan 14,87% pada akhir tahun 2013. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.11 sebagai berikut:

Tabel I.11
Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2010-2014

URAIAN	2010	2011	2012	2013
Penduduk Miskin %	17,86	17,38	16,13	14,87

Sumber : Bappeda Kabupaten Grobogan

b) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel I.12
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 – 2013

Tahun	2010	2011	2012	2013
Nilai IPM	70,83	71,27	71,77	72,37

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 adalah sebesar 72,37. Angka ini termasuk dalam kategori kelas pembangunan manusia menengah keatas. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c) Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah. Berikut ini data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014, sebagaimana Tabel I.13 berikut:

Tabel I.13
Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan tahun 2010-2014

No	Jenis Tempat	Jumlah				
	Ibadah	2010	2011	2012	2013	2014
1	Masjid	1310	1335	1345	1345	1345
2	Mushola	6672	1146	1712	1712	1712
3	Langgar/surau	-	4223	4608	4608	4608
4	Gereja	114	114	111	111	111
5	Pura/Kuil/Vihara	19	19	18	18	18
6	P. Sosial Asuhan Anak	28	28	28	28	28
7	P. Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	1
8	Panti Orang Gila	1	1	1	1	1
9	Panti Persinggahan	1	1	1	1	1
10	Panti Cacat	1	1	1	1	1

Sumber data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Grobogan

8. Kesehatan

Indikator pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan



kesehatan tahun 2014 secara rinci seperti pada tabel 1.14 berikut:

Tabel I.14
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan tahun 2014

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Rumah Sakit	7	7	-	-
2.	Puskesmas	30	22	7	1
3.	Puskesmas pembantu	69	44	15	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2014

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKABA) serta Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKBA dan prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2010 sampai dengan 2014 seperti pada tabel 1.15 berikut:

Tabel 1.15
Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2014

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	AKB/1000 KH	11,86	8,78	10,60	14,14	17,82
2.	AKI/100.000 KH	80,02	114,04	150,12	101,10	188,69
3.	AKABA/1000 KH	12,22	9,12	11,61	15,72	19,53
4.	% BBLR	14,62	9,31	4,0	3,83	0,74
5.	Prevalensi Gizi Buruk Balita	0,02	0,03	0,04	0,02	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2014

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka ini menunjukkan kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0–12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Berdasarkan tabel I.14, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2014 sebesar 17,82 kelahiran hidup (KH). Dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 14,14 KH, maka tahun ini AKB mengalami kenaikan, namun apabila dibandingkan dengan target MDGs ke-4 tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini masih sesuai target.



b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 perlu mendapatkan perhatian yang serius yaitu sebesar 188,69, jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 101,1 angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan apalagi jika dibandingkan dengan target MDGs ke-5 tahun 2015 yaitu sebesar 102 per 100.000.

c) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka ini menunjukkan angka kematian anak balita (12 – 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dan dipergunakan untuk mengetahui tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/posyandu dan untuk menilai kondisi dan sanitasi lingkungan.

Pada tahun 2014 AKABA sebesar 19,53 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 15,72 mengalami kenaikan, meskipun bila dibandingkan dengan target MDGs ke-4 tahun 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup, masih dalam target.

d) Gizi Buruk

Penentuan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB).

Penentuan dengan membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan sesuai pedoman di posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan penyaringan berikutnya, dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya. Jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit.

Di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 persentase Balita dengan Gizi Buruk sebesar 0,04% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,02%.

9. Kondisi Ekonomi

a) Potensi Daerah

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk unggulan di Kabupaten Grobogan adalah : padi, jagung, kedelai, dan batu kapur, mebel serta genteng press.



Kondisi produk pertanian yang ada di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I.16 :

Tabel I.16
Kinerja Produksi Pertanian Tahun 2012-2014

No	Jenis	Jumlah		
		2012	2013	2014
1.	Produksi padi sawah (ton)	599.689 Ton	622.715 Ton	555.784 Ton
2.	Luas panen padi sawah (ha)	105.710 Ha	109.498 Ha	107.455 Ha
3.	Produksi padi gogo (ton)	19.818 Ton	20.603 Ton	24.488 Ton
4.	Luas panen padi gogo (ha)	4.219 Ha	4.222 Ha	5.982 Ha
5.	Produksi jagung (ton)	568.214 Ton	588.997 Ton	595.366 Ton
6.	Luas panen jagung (ha)	100.502 Ha	98.908 Ha	106.122 Ha
7.	Produksi kedelai (ton)	56.167 Ton	32.314 Ton	50.582 Ton
8.	Luas panen kedelai (ton)	23.778 Ha	14.615 Ha	22.619 Ha
9.	Jumlah kelompok tani	1.673 poktan	1.671 poktan	1.681 poktan
11.	Jumlah Penggilingan padi (Unit)	891 Unit	1.040 unit	1.086 Unit

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

b) Pertumbuhan PDRB

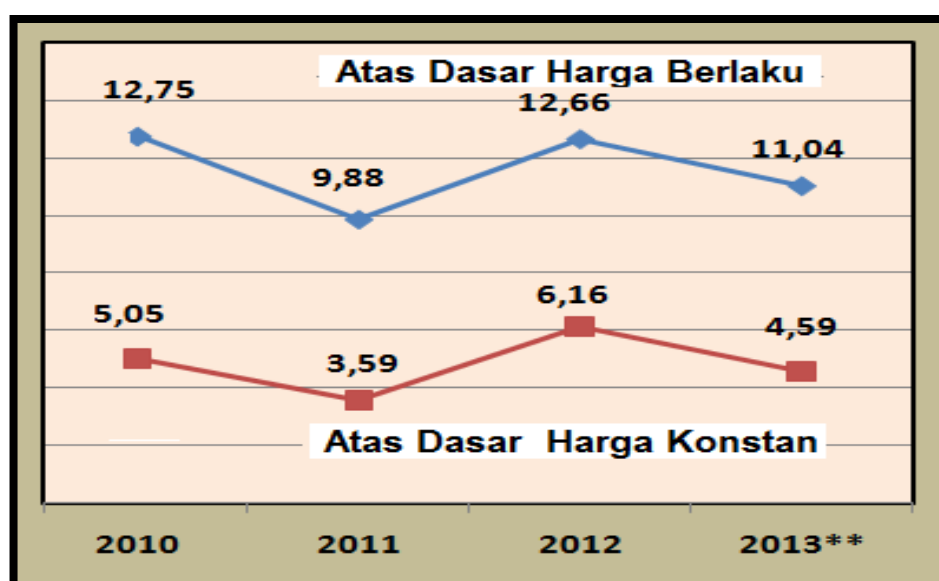
Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,04 dan atas dasar harga konstan sebesar 4,59. Angka pertumbuhan PDRB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel I.17 dan gambar I.4 sebagai berikut:



Tabel I.17
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

PDRB	2010	2011	2012	2013
Atas Dasar Harga Berlaku	12,75	9,88	12,66	11,04
Atas Dasar Harga Konstan	5,05	3,59	6,16	4,59

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan



Gambar. I.4

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan

c) Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB

Pada tahun 2014, Jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, adalah sektor/bidang usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 9,14, sedangkan pertumbuhan terendah berada pada sektor pertanian sebesar 0,52.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2010 sampai dengan 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel I.18 sebagai berikut:



Tabel I.18
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
1	Petanian	3,84	0,73	5,03	0,52
2	Pertambangan dan Penggalian	6,12	6,94	13,82	9,14
3	Industri	6,19	5,60	5,62	6,28
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,15	4,61	6,02	7,36
5	Bangunan	6,95	5,06	7,21	7,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,44	4,24	7,02	6,87
7	Angkutan dan Komunikasi	5,69	6,74	8,07	7,54
8	Keungan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan	5,39	6,06	6,78	8,89
9	Jasa-Jasa	6,34	6,67	6,33	6,73
	Jumlah	5,05	3,59	6,16	4,59

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan

d) Perkembangan PDRB

Secara sektoral, perkembangan PDRB dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel I.19 sebagai berikut :

Tabel I.19
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)			
		2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	1.337.687,16	1.347.492,62	1.415.220,85	1.422.619,55
2	Pertambangan/ Penggalian	48.173,67	51.519,06	58.638,99	63.997,43
3	Industri	108.826,28	114.916,31	121.375,89	129.002,60
4	Listrik, Gas dan air minum	46.595,07	48.743,10	51.679,20	55.483,93
5	Bangunan/Konstruksi	152.515,66	160.231,19	171.783,86	184.029,35
6	Perdagangan/Hotel/Rumah makan	591.809,07	616.880,74	660.165,83	705.519,06
7	Angkutan dan komunikasi	105.911,23	10.234,95	122.174,96	131.388,70



8	Perbankan dan lembaga keuangan	302.685,71	321.041,81	342.809,94	373.284,85
9	Jasa-jasa	559.194,71	596.471,13	634.213,27	676.924,36
	Jumlah	3.253.398,56	3.267.530,91	3.578.062,78	3.742.249,82

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan

Tabel I.20
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)			
		2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2.845.126,37	3.054.164,39	3.428.780,64	3.677.748,69
2	Pertambangan/ Penggalian	85.841,73	96.034,86	114.955,30	131.198,49
3	Industri	189.771,94	209.446,64	234.472,05	263.495,74
4	Listrik, Gas dan air minum	107.926,46	119.653,10	132.088,81	149.698,21
5	Bangunan/Konstruksi	366.015,74	412.139,06	466.829,91	533.824,81
6	Perdagangan/Hotel/Ru mah makan	1.156.036,66	1.294.984,09	1.471.879,77	1.676.655,76
7	Angkutan dan komunikasi	219.898,28	246.960,86	280.736,93	323.732,14
8	Perbankan dan lembaga keuangan	560.039,24	632.930,10	702.329,67	802.327,16
9	Jasa-jasa	968.937,85	1.075.148,53	1.213.385,00	1.374.873,60
	Jumlah	6.499.594,27	7.141.461,63	8.045.458,09	8.933.554,59

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan

e) PDRB Per Kapita

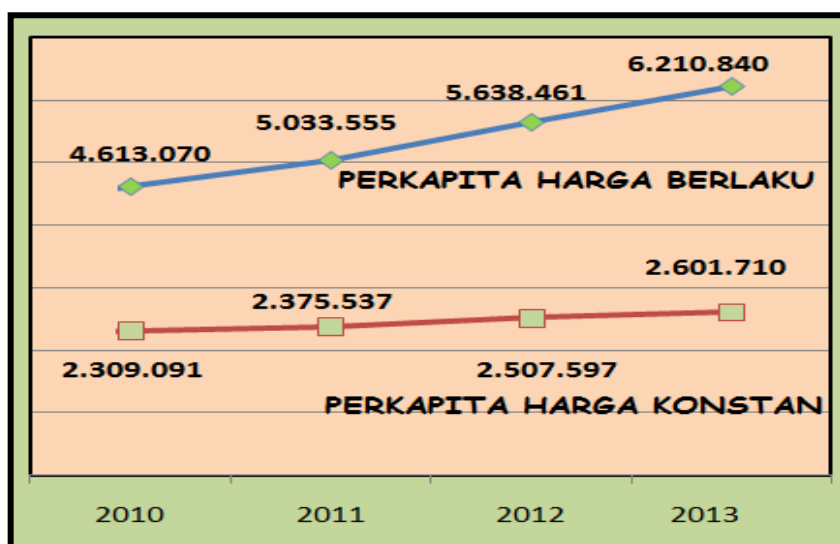
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2014 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.21 sebagai berikut :

Tabel I. 21
PDRB Per Kapita Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah penduduk Pertengahan Tahun	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan	harga berlaku	harga konstan
1	2	3	4	5	6	7
1	2010	1.408.952	6.499.594,27	3.253.398,56	4.613.070	2.309.091
2	2011	1.418.771	7.141.461,63	3.267.530,91	5.033.555	2.375.537
3	2012	1.426.889	8.045.458,09	3.578.062,78	5.613.001	2.496.274
4	2013	1.438.381	8.933.554,59	3.742.249,82	6.210.840	2.601.710

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp.2.601.710,- atau naik 3,75% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp.6.210.840,- atau naik sebesar 10,15%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat dari grafik dalam I.5 sebagai berikut:

Gambar I.5
Grafik Perkembangan Pendapatan Per kapita Tahun 2010-2014

f) Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,86 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,03. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut:



Tabel I.22
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014
INFLASI	7,45	1,86	4,48	7,88	8,03

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan.

g) Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia). Berdasarkan kriteria tersebut, maka kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel I.23
Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat
Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	Interpretasi
1.	Indeks Gini Ratio	0,28	0,26	0,35	0,34	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di bawah batas ketimpangan (<0,35)
2.	Prosentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah	23,46%	26,34%	18,91%	21,38%	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di atas batas ketimpangan (>17%)

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data pada Tabel I.23, di atas dapat diketahui bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (*low inequality*) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut:

- 1) Angka Indeks Gini Ratio selama empat tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35.
- 2) Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah dalam empat tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni mulai tahun 2010 sebesar 23,46%, tahun 2011 sebesar 26,34%, tahun 2012 sebesar 18,91% serta pada tahun 2013 sebesar 21,38%.



2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun anggaran 2014 diarahkan pada:

- a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
- c) Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Grobogan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
- d) Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi;
- e) Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

Kebijakan teknis terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

- (1) Menggali sumber pendapatan baru disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Melakukan insensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- (3) Melakukan penyesuaian pendapatan daerah dari sumber Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, sesuai dengan pagu yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah;
- (4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan;
- (5) Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi perubahan peraturan bupati disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
- (6) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan secara terus-menerus sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik;
- (7) Melakukan perhitungan kembali potensi sumber-sumber pendapatan daerah;



- (8) Melakukan tukar-menukar informasi antar daerah sebagai referensi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- (9) Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan tata perijinan investasi;
- (10) Meningkatkan kegiatan promosi potensi unggulan daerah, baik didalam maupun diluar negeri untuk menarik investor.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan pencatatan sipil
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- m. Sosial
- n. Ketenagakerjaan
- o. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- p. Penanaman modal
- q. Ketahanan pangan
- r. Kebudayaan
- s. Kepemudaan dan olah raga
- t. Perpustakaan
- u. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- v. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian
- w. Pemberdayaan masyarakat desa
- x. Statistik



- y. Kearsipan
- z. Komunikasi dan informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan sumber daya mineral
- d. Pariwisata
- e. Kelautan dan perikanan
- f. Perdagangan
- g. Industri
- h. Ketramigrasian.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang dipergunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan ketentraman
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan sosial.

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung
- b. Belanja langsung.

Kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2014 antara lain diarahkan pada:

- a. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan
- c. Anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk maju dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.



Kebijakan teknis anggaran belanja tahun anggaran 2014 adalah diarahkan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk:
 - a) Belanja gaji dan tunjangan pegawai disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata berupa kenaikan gaji PNS, kenaikan tunjangan beras, serta penerimaan CPNS kategori 2, kenaikan iuran kepada BPJS, pengaruh pemberlakuan UU ASN terkait usia batas pensiun PNS.
 - b) Belanja pegawai diluar belanja gaji, untuk anggaran tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - c) Belanja bunga, dipergunakan untuk membayar bunga yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan sesuai dengan kebutuhan riil.
 - d) Belanja hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - e) Belanja bantuan sosial diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial. Bantuan ini meliputi bantuan sosial yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana.
 - f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
 - g) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dipergunakan untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, yang termasuk di dalamnya untuk Alokasi Dana Desa/Kelurahan, dan bantuan kesejahteraan bagi perangkat desa se-Kabupaten Grobogan.
 - h) Belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

 - a) Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui:
 - Peningkatan jalan dan jembatan ruas kabupaten



- Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan
- Peningkatan infrastruktur pengairan
- b) Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan pelestarian sumber daya alam dan lain-lain
- c) Memantapkan upaya tata kelola pemerintahan
- d) Melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013
- e) Menampung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dan kebutuhan mendesak, serta kebutuhan bersifat rutin yang belum dianggarkan, maupun melakukan penyesuaian berdasarkan perhitungan kebutuhan riil selama satu tahun anggaran.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - f. Penerimaan piutang daerah
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

2.3. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja APBD tercermin dari prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah dengan gambaran sebagai berikut:

2.4.1. Pendapatan

Pada sisi pendapatan daerah target kinerjanya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.642.386.125.000,00 terealisasi sebesar Rp1.711.056.213.805,00 atau sebesar 104,18%, melebihi anggaran sebesar Rp68.670.088.805,00. Jika dibandingkan dengan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2013 sebesar Rp1.549.709.105.117,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp161.347.108.688,00 atau 10,41%.



2.4.2. Belanja

Pada sisi belanja dari anggaran sebesar Rp1.788.253.908.250,00 terealisasi sebesar Rp1.645.804.824.542,00 atau sebesar 92,03% dan kurang dari anggaran sebesar Rp142.449.083.708,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp1.507.949.202.417,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp137.855.622.125,00 atau 9,14%.

Belanja daerah tahun 2014 meliputi:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang antara lain dipergunakan untuk mencukupi belanja sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai, dari anggaran sebesar Rp899.369.262.750,00 terealisasi sebesar Rp899.369.262.750,00 atau tercapai 92,97% maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp63.251.365.453,00.
- b. Belanja bunga, dialokasikan anggaran sebesar Rp47.205.000,00 terealisasi sebesar Rp24.948.302,00 atau tercapai 52,85% maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.256.698,00
- c. Belanja subsidi, dialokasikan anggaran sebesar Rp428.500.000,00 terealisasi sebesar Rp428.500.000,00 atau tercapai 100%.
- d. Belanja hibah, dialokasikan anggaran sebesar Rp105.995.429.048,00 terealisasi sebesar Rp101.634.714.677,00 atau tercapai 95,89%
- e. Belanja bantuan sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp9.620.293.700,00 terealisasi sebesar Rp7.813.425.000,00 atau tercapai 81,22%
- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp82.988.286.500,00 terealisasi sebesar Rp79.026.601.435,00 atau tercapai 95,21%.
- g. Belanja tidak terduga, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak digunakan atau tidak direalisasikan.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp757.920.736.000,00 terealisasi sebesar Rp691.035.152.900,00 atau tercapai 91,18%.